

# *Pendidikan Karakter: Menyemai Moralitas Agama dan Kenegarawanan*<sup>1</sup>

Oleh: Samsuri<sup>2</sup>

---

*Prinsip K e t u h a n a n! Bukan saja Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. ... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoism-agama”. Dan hendaknya N e g a r a Indonesia satu N e g a r a yang ber-Tuhan. ...jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen deangan cara b e r k e a d a b a n.*

*(Pidato Ir. Soekarno di depan Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)*

*Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-undang Dasar. Oleh karena itu maka dapat disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi: “Presiden ialah orang Indonesia asli.” “Yang beragama Islam”, dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Republik Indonesia orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum Undang-undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah di Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang ada pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun.*

*(Drs. Moh. Hatta, dalam Sidang Pertama PPKI, 18 Agustus 1945)*

## **Pendahuluan**

Dua kutipan pidato dua Bapak Bangsa di atas, dalam peristiwa penting di awal pembentukan Republik Indonesia, sengaja disuguhkan untuk me-*refresh* cita kebangsaan Indonesia yang sedang menghadapi ujian pasca-1998. Gemuruh kehidupan berbangsa dan bernegara kita seolah mempertanyakan ulang tentang jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beradab, humanis, dan religius. Bagaimana bisa, bangsa Indonesia yang dikenal ramah-tamah, sopan-santun, tertib-rukun, bersahaja, setelah lebih dari satu dekade melewati era reformasi menjadi berubah 180 derajat. Wajah bangsa kita seperti kehilangan wajah asli, jatidiri yang otentik. Bagaimana bisa, radikalisasi dan gerakan ekstrim-anarkhis menjadi pemandangan sehari-hari dalam ruang publik: *Teror Bom, Bom Bunuh Diri*, penyerangan satu

---

<sup>1</sup> Bahan kajian Seminar Nasional Pendidikan “Revitalisasi Pendidikan Karakter menuju Progresivitas Pendidikan Nasional,” HMPS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 14 Mei 2011.

<sup>2</sup> Dosen tetap Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, dst. Apa yang salah dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita?

Untuk keperluan diskusi ini, pemakalah tidak bermaksud mendramatisir antara prinsip-prinsip kenegaraan dari para *founding fathers* Indonesia yang mengusung kehidupan berbangsa secara religius dan humanis dalam wajah ke-Indonesia-an yang berkeadaban (*civilized*), dengan fenomena yang tengah berlangsung sekarang. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan untuk mengawal moralitas kenegarawanan dan semangat keagamaan dari para Bapak Bangsa itu? Ini semata-mata bukan hanya politik pendidikan nasional sedang gegap gempita mengumandangkan pentingnya pendidikan karakter. Namun, apa yang bisa diharapkan dari pendidikan karakter untuk menyemai nilai moral agama dan kenegarawanan sebagai teladan bagi generasi muda bangsa ini?

Ketika berbicara “pendidikan karakter”, yang selalu ditakuti oleh penulis ini ialah pola pendidikan karakter yang akan mengikuti pola semacam penataran P4 di masa, yang oleh sebagian besar kalangan dianggap gagal. Karena dalam prakteknya penghayatan/pembentukan watak Pancasila bangsa cenderung indoktrinatif. Yang terjadi, ialah dominasi pembangunan “kesetiaan semu” guna mendukung rejim kekuasaan yang ada, minimnya keteladanan, kurangnya membangun pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*).

Perlu disadari bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan sepanjang hayat, sehingga ada mata rantai mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah (kampus). Dengan demikian, kesan bahwa pembentukan kepribadian semata-mata tanggung jawab lembaga pendidikan formal tidak mesti terjadi.

## **Nomenklatur Pendidikan Karakter**

Ada beberapa penamaan nomenklatur untuk merujuk kepada kajian pembentukan karakter peserta didik, tergantung kepada aspek penekanannya. Di antaranya yang umum dikenal ialah: Pendidikan Moral, Pendidikan Nilai, Pendidikan Religius, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Karakter itu sendiri. Masing-masing penamaan kadang-kadang digunakan secara saling bertukaran (*inter-exchanging*), misal pendidikan karakter juga merupakan pendidikan nilai atau pendidikan religius itu sendiri (Kirschenbaum, 2000). Sebagai kajian akademik, pendidikan karakter tentu saja perlu memuat syarat-syarat keilmiah akademik seperti dalam *konten* (isi), pendekatan dan metode kajian. Di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat terdapat pusat-pusat kajian pendidikan karakter (Character Education Partnership; International Center for Character Education). Pusat-pusat ini telah mengembangkan model, konten, pendekatan dan instrumen evaluasi pendidikan karakter. Tokoh-tokoh yang sering dikenal dalam pengembangan pendidikan karakter antara lain Howard Kirschenbaum, Thomas Lickona, dan Berkowitz. Pendidikan karakter berkembang dengan pendekatan kajian multidisipliner: psikologi, filsafat moral/etika, hukum, sastra/humaniora.

Terminologi “karakter” itu sendiri sedikitnya memuat dua hal: *values* (nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah

entitas. "Karakter yang baik" pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah "baik" sebagai sesuatu yang "asli" atautkah sekadar kamufase. Dari hal ini, maka kajian pendidikan karakter akan bersentuhan dengan wilayah filsafat moral atau etika yang bersifat universal, seperti kejujuran. Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadikan "upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai, untuk membantu siswa mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak dengan cara-cara yang pasti" (Curriculum Corporation, 2003: 33). Persoalan baik dan buruk, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter semacam ini.

Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang: mentalitas, sikap dan perilaku. Pendidikan karakter semacam ini lebih tepat sebagai pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tentang tata-krama, sopan santun, dan adat-istiadat, menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang dapat disebut berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan norma-norma yang bersifat kontekstual dan kultural.

Bagaimana pendidikan karakter yang ideal? Dari penjelasan sederhana di atas, pendidikan karakter hendaknya mencakup aspek pembentukan kepribadian yang memuat dimensi nilai-nilai kebajikan universal dan kesadaran kultural di mana norma-norma kehidupan itu tumbuh dan berkembang. Ringkasnya, pendidikan karakter mampu membuat kesadaran transendental individu mampu terejawantah dalam perilaku yang konstruktif berdasarkan konteks kehidupan di mana ia berada: Memiliki kesadaran global, namun mampu bertindak sesuai konteks lokal.

### **Ragam Model Program Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktikkan di sejumlah negara. Studi J. Mark Halstead dan Monica J. Taylor (2000) menunjukkan bagaimana pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai sebagai cara membentuk karakter terpuji telah dikembangkan di sekolah-sekolah di Inggris. Peran sekolah yang menonjol terhadap pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut ialah dalam dua hal yaitu:

*to build on and supplement the values children have already begun to develop by offering further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense of and apply their own developing values* (Halstead dan Taylor, 2000: 169).

Untuk membangun dan melengkapi nilai-nilai yang telah dimiliki anak agar berkembang sebagaimana nilai-nilai tersebut juga hidup dalam masyarakat, serta agar anak mampu merefleksikan, peka, dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan karakter tidak bisa berjalan sendirian. Dalam kasus di Inggris, review penelitian tentang pengajaran nilai-nilai selama dekade 1990-an memperlihatkan bahwa pendidikan karakter yang diusung dengan kajian nilai-nilai dilakukan dengan program lintas kurikulum. Halstead dan Taylor (2000: 170-173) menemukan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tersebut juga

disajikan dalam pembelajaran *Citizenship; Personal, Social and Health Education (PSHE)*; dan mata pelajaran lainnya seperti Sejarah, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Alam dan Geografi, Desain dan Teknologi, serta Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

”Karakter warga negara yang baik” merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia. Meskipun terdapat ragam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara (Kerr, 1999; Cholisin, 2004; Samsuri, 2004, 2009) menunjukkan bahwa pembentukan karakter warga negara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama-sama pendidikan karakter melalui implementasi dokumen *The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools* (2005). Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan karakter warga negara nampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk ”menitipkannya” melalui Pendidikan Kewarganegaraan di samping Pendidikan Agama.

Persoalannya apakah nilai-nilai pembangun karakter yang diajarkan dalam setiap mata pelajaran harus bersifat eksplisit ataukah implisit saja? Temuan Halstead dan Taylor (2000) pun menampakkan perdebatan terhadap klaim-klaim implementasi pengajaran nilai-nilai moral dalam Kurikulum Nasional di Inggris (terutama di era Pemerintahan Tony Blair). Klaim-klaim tersebut antara lain menyatakan pentingnya:

- **Sejarah** sebagai sebuah alat untuk membantu siswa mengembangkan toleransi atau komitmen rasional terhadap nilai-nilai demokratis.
- **Bahasa Inggris** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kemandirian dan menghormati orang lain
- **Pengajaran Bahasa Modern** untuk menjamin kebenaran dan integritas personal dalam berkomunikasi
- **Matematika** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan tanggung jawab sosial
- **Ilmu Alam dan Geografi** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan sikap-sikap tertentu terhadap lingkungan
- **Desain dan Teknologi** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai multikultural dan anti-rasis
- **Ekspresi Seni** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kualitas fundamental kemanusiaan dan tanggapan spiritual terhadap kehidupan
- **Pendidikan Jasmani dan Olah Raga** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kerjasama dan karakter bermutu lainnya (diadaptasikan dari Halstead dan Taylor, 2000: 173).

Paparan tersebut memperkuat alasan bahwa pendidikan karakter merupakan program aksi lintas kurikulum. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diselenggarakan sebagai program kurikuler yang berdiri sendiri (*separated subject*) dan lintas kurikuler (*integrated subject*). Namun, pendidikan karakter juga dapat dilaksanakan semata-mata sebagai bagian

dari program ekstra-kurikuler seperti dalam kegiatan kepanduan, layanan masyarakat (*community service*), maupun program *civic voluntary* dalam tindakan insidental seperti relawan dalam mitigasi bencana alam.

Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler dapat didekati dari perspektif programatik maupun teoritis.

#### **a. Perspektif programatik**

1. *Habit versus Reasoning*. Beberapa perspektif menekankan kepada pengembangan penalaran dan refleksi moral seseorang, perspektif lainnya menekankan kepada mempraktikkan perilaku kebajikan hingga menjadi kebiasaan (*habitual*). Adapula yang melihat keduanya sebagai hal penting.
2. *"Hard" versus "Soft" virtues*. Pertanyaan-pertanyaan: apakah disiplin diri, kesetiaan (*loyalitas*) sungguh-sungguh penting? atau, apakah kepedulian, pengorbanan, persahabatan sangat penting? Kecenderungannya untuk menjawab YA untuk kedua pertanyaan tersebut.
3. *Focus on the individual versus on the environment or community*. Apakah karakter yang tersimpan pada individu atautkah karakter yang tersimpan dalam norma-norma dan pola-pola kelompok atau konteks? Jawabnya, memilih kedua-duanya (Schaps & Williams, 1999 dalam Williams, 2000: 35).

#### **b. Perspektif Teoritis**

1. *Community of care* (Watson)
2. *constructivist approach to sociomoral development* (DeVries)
3. *child development perspectives* (Berkowitz)
4. *eclectic approach* (Lickona)
5. *traditional perspective* (Ryan) (the National Commission on Character Education dalam Williams, 2000: 36)

### **Efektivitas Pendidikan Karakter**

Character Education Partnership (2003) telah mengembangkan standar mutu Pendidikan Karakter sebagai alat evaluasi diri terutama bagi lembaga (sekolah/kampus) itu sendiri. Instrumen berupa skala Likert (0 – 4) dengan memuat 11 prinsip sebagai berikut:

1. mempromosikan nilai-nilai etis sebagai dasar karakter yang baik (nilai-nilai etis yang pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa).
2. mengartikan "karakter" secara utuh termasuk pemikiran, perasaan dan perilaku.
3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk perkembangan karakter.
4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus/sekolah.
5. memberikan para peserta didik peluang untuk melakukan tindakan moral.
6. memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang dengan menghormati semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu mereka berhasil.
7. mendorong pengembangan motivasi diri peserta didik.
8. melibatkan staf/karyawan kampus (sekolah) sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter serta berupaya untuk mengikuti nilai-nilai inti yang sama yang memandu pendidikan para peserta didik.
9. memupuk kepemimpinan moral dan dukungan jangka-panjang terhadap inisiatif pendidikan karakter.
10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.

11. menilai karakter kampus, fungsi staf kampus (sekolah) sebagai pendidik karakter, dan memperluas kesempatan para peserta didik untuk menampilkan karakter yang baik.

Efektivitas implementasi program juga dipengaruhi oleh bagaimana strategi-strategi pembelajarannya dilakukan. Ada beberapa model dan strategi pembelajaran pendidikan karakter yang dapat dipergunakan, antara lain:

1. *Consensus building* (Berkowitz, Lickona)
2. *Cooperative learning* (Lickona, Watson, DeVries, Berkowitz)
3. *Literature* (Watson, DeVries, Lickona)
4. *Conflict resolution* (Lickona, Watson, DeVries, Ryan)
5. *Discussing and Engaging students in moral reasoning.*
6. *Service learning* (Watson, Ryan, Lickona, Berkowitz) (Williams, 2000: 37)

Di luar model pembelajaran karakter tersebut, ada beberapa model penting lainnya sehingga pendidikan karakter dapat efektif. Mengikuti Halstead dan Taylor (2000), pertama, adalah pendidikan karakter melalui kehidupan sekolah/kampus; Visi-misi sekolah/kampus; teladan guru/dosen, dan penegakan aturan-aturan dan disiplin. Model ini menekankan pentingnya dibangun kultur sekolah/kampus yang kondusif untuk penciptaan iklim moral yang diperlukan sebagai *direct instruction*, dengan melibatkan semua komponen penyelenggara pendidikan. Ini sebenarnya mirip dengan kesebelas instrumen efektivitas pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Character Education Partnership (2003) di atas.

Kedua, penggunaan metode di dalam pembelajaran itu sendiri. Metode-metode yang dapat diterapkan antara lain dengan *problem solving*, *cooperative learning* dan *experience-based projects* yang diintegrasikan melalui pembelajaran tematik dan diskusi untuk menempatkan nilai-nilai kebajikan ke dalam praktek kehidupan, sebagai sebuah pengajaran bersifat formal (Halstead dan Taylor, 2000: 181). Metode bercerita, *Collective Worship* (Beribadah secara Berjamaah), *Circle Time* (Waktu lingkaran), Cerita Pengalaman Perorangan, Mediasi Teman Sebaya, atau pun Falsafah untuk Anak (*Philosophy for Children*) dapat digunakan sebagai alternatif pendidikan karakter (Halstead dan Taylor, 2000)

### **Pendidikan Karakter sebagai Instrumen Politik Pendidikan Nasional**

Pembangunan karakter bangsa melalui instrumen politik pendidikan nasional di Indonesia sudah dimulai sebelum kritik terhadap model Pendidikan Pancasila era Orde Baru. Pada masa sebelumnya, Presiden Soekarno selalu menekankan pentingnya *nation and character building* dalam rangka membentuk manusia sosialis Indonesia yang berdasarkan Pancasila, melalui proses edukatif yang bersifat revolusioner. Di masa Orde Baru, karakter manusia Indonesia sebagai manusia pembangunan tercermin dalam sejumlah Garis-garis Besar Haluan Negara. ***Manusia-manusia pembangunan*** memiliki karakter sebagai sebagai berikut: *sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, cerdas, berbudi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, setia kawan, percaya pada diri sendiri, sikap menghargai jasa para pahlawan, inovatif dan kreatif, serta berorientasi ke masa depan.*

(diolah dalam Samsuri, 2010). Ciri-ciri karakter tersebut secara normatif dapat diterima oleh semua kalangan. Persoalannya, bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian ciri-ciri positif karakter tersebut, tampaknya tidak terselesaikan hingga gerakan reformasi bergulir. Pembentukan karakter warga negara cenderung sebagai retorika pembangunan seperti dalam jargon membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila seakan menemukan "jalan buntu," ketika secara politik Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dicabut oleh MPR dalam sebuah sidang istimewa bulan Nopember 1998. Padahal P4 inilah yang menjadi "mata air" dan "roh" dari pembentukan karakter warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan di persekolahan yang ketika itu bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan pencabutan P4, maka terdapat "kekokosongan" materi pokok dalam kajian PPKn terutama di sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Setelah lewat satu dekade, penilaian terhadap keputusan politisi di MPR yang juga kebetulan sebagian besar diangkat oleh Pemerintahan Presiden Soeharto adalah menyayangkan pencabutan P4 tersebut. Seorang ilmuwan politik yang juga menjadi anggota DPR/MPR pada periode itu, Amir Santoso, juga menyayangkan keputusan sebagian besar anggota MPR untuk mencabut P4, karena "cita-citanya bagus, tapi metodenya yang salah, karena sifatnya indokrinatif. ... metodenya yang tidak betul, metode penyampaiannya yang kurang bagus" (Wawancara, 29 April 2010). Persoalannya bukan kepada substansi nilai-nilai pengamalan Pancasila dalam P4, tetapi kepada metode penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa sehari-hari.

Suasana euforia setelah keluar dari suasana politik otoriter tidak bisa dinilai sebagai satu-satunya penyebab utama kenapa sebagian besar politisi di MPR "gelap mata" sehingga mencabut P4. Pertanyaan yang diajukan sejumlah kalangan akademisi maupun aktivis gerakan masyarakat kewargaan cenderung sama, apakah pendidikan P4 gagal atau berhasil? Dalam amatan Daniel Dhakidae (2001: 24-25), pendidikan P4 tergolong menyita anggaran biaya yang tidak kecil untuk program ideologisasi masyarakat di semua kelas dan golongan ke segenap penjuru daerah di Indonesia. Dalam taraf tertentu program ideologisasi (berbentuk penataran P4) tersebut tampaknya hanya bisa dibandingkan dengan program Departemen Ideologi Uni Soviet yang hendak mengontrol masyarakat dengan tafsir ideologi tunggal rezim. Dari sini penilaian yang bijak adalah bukan masalah berhasil atau gagalnya pendidikan P4, tetapi sejauh mana Pancasila dimaknai oleh segenap warga negara. Dalam hal ini pemakalah sependapat dengan Dhakidae yang menyatakan bahwa:

Pancasila menjadi suatu makhluk di langit dan tidak tersentuh oleh proses normal kehidupan masyarakat warga di bumi sehingga korupsi tetap diakui sebagai korupsi, tetapi korupsi dilakukan oleh *oknum* yang tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Pancasila tetap *bersih* meskipun yang memujanya adalah kaum koruptor dan yang menyembahnya adalah para pembunuh (Dhakidae, 2001: 26).

Dari pernyataan tersebut, masalah pokoknya adalah bagaimana mendudukan Pancasila kembali kepada fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan suatu *gentlemen agreement*, sebagaimana dikukuhkan oleh para pendiri negara. "Membumikan" Pancasila

agar tetap relevan dan memiliki makna sebagai panduan berbangsa dan bernegara agar Pancasila adalah lebih utama daripada menyanjung-nyanjungnya sebagai warisan leluhur yang sangat tinggi nilainya dalam setiap pidato kenegaraan ataupun upacara-upacara. Namun, di pihak lain, justru Pancasila diperalat oleh kepentingan politik rejim untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman sebelum dan selama Orde Baru terhadap tafsir pengamalan Pancasila menjadi pelajaran penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

### **Membumikan Moralitas Agama dan Kenegarawanan dalam Pendidikan Karakter**

Permintaan panitia seminar untuk mengkaji “Revitalisasi Pendidikan Karakter menuju Progresivitas Pendidikan Nasional,” penulis tafsiri sebagai: (1) proses pencarian model pendidikan karakter dengan memanfaatkan kearifan lokal dan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia baik dari ajaran agama maupun teladan kenegarawanan para bapak bangsa negeri ini; (2) pendidikan karakter yang membumi, tidak sekadar teoritik tapi sebuah pendidikan mengakar dengan kehidupan dan pengalaman hidup seorang anak bangsa. Meminjam konsepsi falsafah pendidikan –seperti dari John Dewey, maka progresivisme dalam pendidikan karakter juga selain *learning by doing* ialah *learning by experiencing*, *learning by living*.

Pengalaman “kegagalan” pembentukan watak bangsa melalui P4 antara lain nilai-nilai yang begitu mulia terasa jauh dari kenyataan hidup seorang warga negara, jika melihat praksis kehidupan bernegara dari para elite kekuasaan. Bagaimana bisa menerima seruan “tidak bergaya hidup mewah” dan “hidup boros”, jika anak-anak pejabat atau para pejabat negara itu sendiri, yang kebanyakan di antaranya ialah para manggala justru mencontohkan gaya hidup sebaliknya. Dari sini tepat kiranya pesan pedagogis dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang memandang perlu pendidikan karakter dilakukan dengan model *Ing Ngarso Sing Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Dengan demikian, keteladanan dalam pendidikan karakter penting untuk mewujudkannya dalam sistem pendidikan nasional.

Persoalan “peminggiran” Pancasila dalam ranah publik Indonesia, penulis pikir bukanlah kesalahan rakyat. Justru yang “memarjinalkan” Pancasila dari arena kehidupan berbangsa ialah dari elite politik dan pejabat publik. Bagaimana bisa menyalahkan rakyat yang mencari jati dirinya di tengah himpitan kerasnya kehidupan, sementara elite politik dan pejabat negara memamerkan keserakahan dan monopoli kebenaran atas nama undang-undang, yang entah didasari oleh nilai-nilai Pancasila atau tidak. Sungguh ironis!

Mengajarkan kebenaran agama adalah suatu keharusan bagi pemeluk-pemeluknya. Karena “kebenaran agama” memberikan jaminan bagi para pengikutnya dalam menjalankan keyakinannya itu. Persoalannya, bagaimana “klaim kebenaran agama” tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan, tetapi klaim itu menjadi energi positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk. Banyak ikhtiar semacam dialog lintas iman dilakukan, namun tentu saja itu cukup. Karena dialog masih sekadar wacana elite agamawan. Untuk itu, penyemaian dialog lintas iman untuk mengukuhkan moralitas agama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sekadar di lingkungan sekolah. Peran keluarga dan



masyarakat untuk membumikan moralitas agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat strategis dan bermakna penting, sehingga pendidikan karakter benar-benar efektif.

Semoga!

## Daftar Pustaka

- Alberta Education. (2005). *The Heart of Matter: Character and Citizenship Education in Alberta School*. Alberta: Alberta Education, Learning and Teaching Resources Branching, Minister of Education
- Berkowitz, Marvin W. dan Bier, Mellinda C. (2005). *What Works in Character Education: A Research-driven Guide for Educators*. Washington: Character Education Partnership
- Character Education Partnership. (2003). *Character Education Quality Standards*. Washington: Character Education Partnership
- Cholisin. (2004). "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28
- Curriculum Corporation. (2003). *The Values Education Study: Final Report*. Victoria: Australian Government Dept. of Education, Science and Training.
- Dhakidei, D. (2001). "Sistem Sebagai Totalisasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi." dalam St. Sularto (editor). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, pp. 3-29.
- Halstead, J. Mark dan Taylor, Monica J. (2000). "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research." *Cambridge Journal of Education*. Vol. 30 No.2, pp. 169-202.
- Kerr, D. (1999). "Citizenship Education in the Curriculum: An International Review," *The School Field*. Vol. 10, No. 3-4
- Kirschenbaum, Howard. (2000). "From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey." *The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*. Vol. 39, No. 1, September, pp. 4-20
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books
- Samsuri. (2004). "Civic Virtues dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru" *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Samsuri. (2010). "Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaab (*Civil Society*) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era

Reformasi).” Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Sekretariat Negara RI. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta Setneg RI

Williams, Mary M. (2000). “Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues.” *The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*. Vol. 39, No. 1, September, pp. 32-40